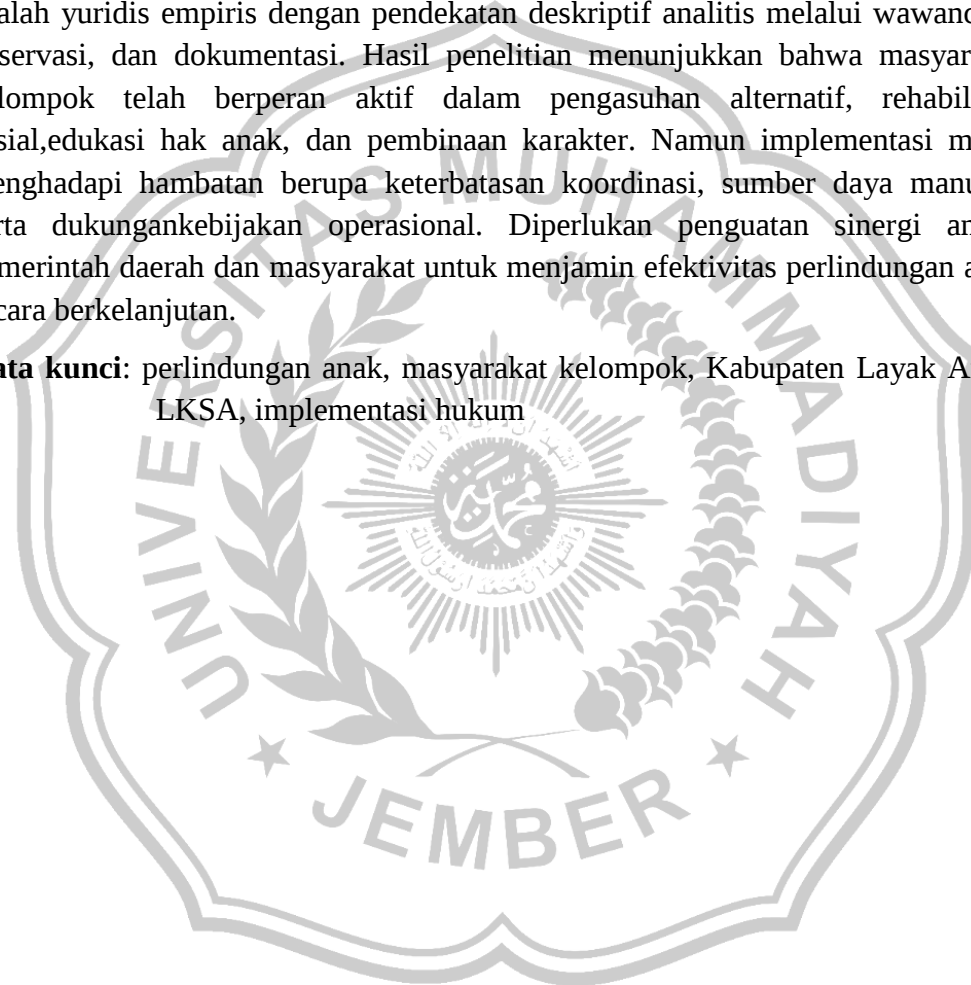


ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak yang menegaskan peran masyarakat dalam perlindungan anak, khususnya melalui Pasal 50 ayat (1). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran masyarakat kelompok dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui studi empiris pada LKSA Putra Muhammadiyah Budi Mulia dan LKSA Putri 'Aisyiyah Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kelompok telah berperan aktif dalam pengasuhan alternatif, rehabilitasi sosial, edukasi hak anak, dan pembinaan karakter. Namun implementasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan koordinasi, sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan operasional. Diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjamin efektivitas perlindungan anak secara berkelanjutan.

Kata kunci: perlindungan anak, masyarakat kelompok, Kabupaten Layak Anak, LKSA, implementasi hukum



ABSTRACT

Child protection is a shared responsibility of the state, family, and community as mandated by Indonesian child protection law. Jember Regency enacted Regional Regulation Number 1 of 2023 concerning Child-Friendly Regency, which emphasizes the role of community participation in child protection under Article 50 paragraph (1). This study aims to analyze the implementation of group-based community roles in child protection services through an empirical study at LKSA Putra Muhammadiyah Budi Mulia and LKSA Putri 'Aisyiyah Jember. The research employs a socio-legal (juridical-empirical) approach using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The findings indicate that community groups actively contribute through alternative caregiving, social rehabilitation, child rights education, and character development. However, implementation remains suboptimal due to limited coordination, human resources, and operational policy support. Strengthening collaboration between local government and community institutions is necessary to ensure sustainable and effective child protection.

Keywords : *child protection, community participation, child-friendly city, social welfare institutions, legal implementation*

